

**Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Pelayanan Bidang Pendidikan
Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Papua**

Detiau Dang

Salmin Dengo

Novie Palar

detiaudangme95@gmail.com

Abstract

The study concluded that the implementation of special autonomy in Papua Province District Wangbe, is not maximized in efforts to achieve a healthy society, cultured, qualified and independent in realizing the various aspects of the construction of more specialized education. It is recommended that education should be improved communication media such as newspapers, radio, banners, brochures and billboards about the existence of special autonomy, and need socialization of all the implementation of the measures taken, it is necessary to do the evaluation, supervision and planning and services clear implementation of the Law on Special Autonomy for Papua. 21 in 2001. In addition, it should be added helpers bureaucracy by considering appropriate educational background with the required fields. Perluh pulah attempted to placed the public service means more strategic and easily accessible by the public. Outlines the main duties and functions based on a clear organizational structure, as well as reorganize the organizational structure with more focus on the technical and operatin standard "procedures as guidelines in implementing the policy of public services in the field of education.implementation of the special autonomy. The study concluded that the implementation of special autonomy in Papua Province District wangbe,in puncak papua is not in efforts to achieve a healthy society, cultured, qualified and independent in realizing the various aspects of the construction of more specialized education. It is recommended that education should be improved communication media such as new spapers, radio, banners, brochures and billboards about the existence of special autonomy, and need socialization of all the

Keywords : Policy Implementation, Of the Special Otonomy Policy in the education

PENDAHULUAN

Salah satu bidang pemerintah yang di desentralisasikan adalah bidang Pendidikan. Pelaksanaan Implementasi Otonomi khusus dalam pelayanan pendidikan di distrik wangbe kabupaten puncak papua, masih menghadapi jumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah factual. jika permasalahan tersebut tidak segerah di tangani maka di kawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan bahwa dampak negative yang lebih kompleks seperti masalah desentralisasi bangsa, itulah sebabnya Undang- undang system pendidikan Nasional (Sisdikna) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas penyelenggaraan Otonomi daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu system pendidikan Nasional dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Implementasi Otonomi khusus dalam Pelayanan bidang pendidikan di distrik wangbe kabupaten puncak papua cakupan penelitian ini meliputi factor Translation ability para pelaku kebijakan termasuk kapasitas Sumber dayah manusia dan pemahamanyaterhadap Implementasi otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang di adopsi dari Teori Gerston (2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek Implementasi otonomi khusus dalam pelayanan bidang pendidikan di tingkat kabupaten atau kecamatan sedangkan wilayah penelitian ini adalah kecamatan

wangbe kabupaten puncak provinsi papua. Berdasarkan krakteristik tujuan penelitian yang ingin di capai maka pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif /naturalistic karena penelitian mengendahkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan focus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kuantitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam dan dapat di percayah, Dengan metode kualitatif, dapat pulah ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma ,nilai, keyakinan kebiasaan ,sikap, mental, dan budayah yang dianus dari seseorang maupun kelompok orang tersebut. Maka penulis bermaksud mengambil judul: “implementasi Kebijakan otonomi khusus bidang pelayanan pendidikan di distrik wangbe kabupaten puncak papua. Ketersediaan guru masih terjadinya kendala kurangnya jumlah, tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan, masyarakat masih termarginalisasi dari segi ekonomi, dan akses infrastruktur yang masih terbatas. Diemban oleh para elit birokrasi, merupakan maka akan terarah pada aspek *Responsivitas*. Dengan demikian, dapat dilacak agregasi pengaruh dari masih rendahnya mutu dan jumlah sumber daya manusia di tanah Papua, lebih khusus Distrik Wangbe kabupaten puncak Sebagai faktor *Responsivitas*. Respon tersebut *terinstitutionalisasi* dalam struktur birokrasi pendidikan.

Melihat dari permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah, Maka dirumuskan: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi khusus Pelayanan Bidang Pendidikan di distrik Wanbe Kabupaten puncak papua .

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui implementasi Kebijakan otonomi khusus pelayanan Bidang pendidikan di distrik wangbe kabupaten puncak papua mengetahui factor-faktor yang menentukan tingkat pelayanan pendidikan di distrik wangbe, kabupaten puncak papua.

Dari hasil penelitian ini diharapkan, akan dapat memberikan bahan masuk bagi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam memberlakukan otonomi khusus di provinsi papua khususnya di kabupaten puncak Distrik wangbe, selain itu hasil penelitian ini diharapkan, akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pelayanan khususnya di bidang pendidikan.

Dari segi ilmiah hasil penelitian di harapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmuh khususnya memperkaya konsep-konsep Implementasi kebijakan melalui pembentukan konsep otonomi khusus dalam pelayanan bidang pendidikan.

KAJIAN TEORI

Penelitian terdahulu

Dalam Penelitian ini, penelitian terdahulu yaitu: Penelitian Oleh Altianua Uamang, Cakti indrah Gunawan dan cahyo Sasmito. Pada Tahun (2016-2017) Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana, Tungadewi, dengan Judul: “Implementasi Kebijakan Otonomi khusus Pendidikan Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika. “Pelaksanaan Penelitian Terdahulu ini, ingin mengkaji lebih

mendalam, mengenai Implementasi kebijakan berkaitan langsung dengan tingkat koordinasi secara hirakis di antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten /kota sampai dengan Pemerinta kampung, yang memang tidak efektif, atau hampir tidak berjalan koordinasinya, dan tidak bersinegri dengan baik, Sehingga masyarakat bahwa selaluh tidak puas dengan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua. Justru lebih Konsumsif daripada produktif.

Penelitian Kedua yaitu: Penelitian yang dilakukan Oleh Depinus Tabuni, Patar Rumapea, William Agustinus Areros (2016) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jl. Kampus Unsrat Bahu, Malalayang Manado 95115 : Berjudul : “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Tentang pelayanan public di bidang pendidikan Kabupaten Puncak Provinsi papua.” ini menunjukkan bahwa komunikasi yang di lakukan lebih menekankan pada komunikasi internal, dimana pemerintah harus memberikan, ruang bagi masyarakat agar, pelaksana Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus berjalan sesuai dengan berdasarkan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus, Organisasi dalam menyelesaikan Birokrasi pendidikan bukan dalam komunikasi, untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan keberadahan dan layanan yang di lakukan sehubungan dengan Pelayanan pendidikan pada masyarakat Umum, Faktor sumber dayah manusia dalam pendidikan baik secara kualitas, maupun kuantitas masih tenang,

mengingat faktor sumber daya manusia yang kurang berkualitas, bahkan sumberdayah pembangunan. Faktor diposisi dalam melaksanakan pekerjaan lebih banyak dilandasi, tanggungjawab sebagai pemerintah untuk menjalankan fungsi Administrasi yang tidak melayani, masyarakat bahkan tidak menjalankan fungsi Administrasi, Birokrasi untuk pendi-dikan di pedalaman.

Penelitian Terdahulu menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Otonomi khusus di Provinsi Papua Kabupaten puncak papua belum maksimal dalam upayah mewujudkan masyarakat yang sehat, berbudayah, berkualitas dan mandiri, dalam mewujudkan berbagai aspek pembangunan dan pendidikan.

a. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi pada dasarnya merupakan tahapan antara pembuatan suatu kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. (Edwards III, 1980). Reply (1985) (Dalam Nawawi : 2007) menempatkan implementasi sebagai tahap ketiga dalam proses kebijakan. Pertama adalah fase penyusunan agenda, kedua formulasi kebijakan dan pengesahan, dan keempat adalah dampak dari kebijakan. Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memungkinkan arah kebijakan publik direalisir sebagai hasil dari aktivitas pemerintah

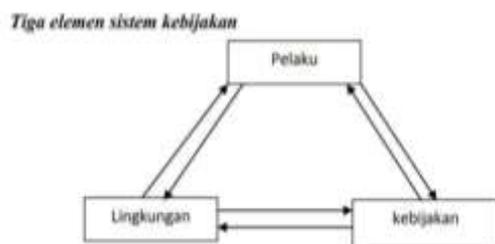
b. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakanpada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesu-litan-kesulitan) dan kemungkinan –kemungkinan (kesempatan-kesem-patan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan

dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serang-kaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) system kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen system kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1
Hubungan Komponen dalam Sistem
Kebijakan menurut Dunn dalam
Ayuningtyas (2014: 15)

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan public yang mengakomodasi aspek teknis, sosio-politik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut.

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat Pembuatan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislative dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati Urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan-tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

c. Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu

sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternative solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan.

d. Pengimplementasian

Merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan Kebijakan public.

d. Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn and William N.(1981).dimensi implementasi Kebijakan public perkaitan dengan rangkaian proses Kebijakan public, yang secara Teoritis terdiri dari 4 hal yaitu :

1. Tahap-tahap kebijakan public yaitu penetapan Agenda kebijakan (*agenda setting*) Formulasi kebijakan (*policy implemen-tation*),adopsi kebijakan.
2. Analisis kebijakan yaitu pemilihan-pemilihan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, Seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk implementasikan
3. Implementasi kebijakan yaitu ber-

kaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program,dalam hal ini bagaimana administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan hingga menerapkan kebijakan yang lelah melalui seleksi.

- a. Komunikasi, ialah komukasi setiap pemangku kebijakan Program. Hendaknya didukung oleh komunikasi dengar instansi Atau Organisasi lain.
- b. Karakteristik, ialah dari parah agen (Unit atau sub unit), ialah karakteristik atau sifat yang ditunjukkan, baik pemangku kebijakan maupun pelaksana yang terlibat dalam implemen-tasi kebijakan.
- c. Keterlibatan lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik, mencakup Sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan dukungan karakteristik para partisipan, ataupun tanggapan sitas opini public.
- d. Sikap atau Disposisi, ialah sikap atau disposisi ditunjukkan parah Implementor terhadap berhasil implementasi kebijakan kepada Publik.

1. Teori Menurut G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) Menurut Subarsono, (2010 : 101), Konsep Teori G. Shabbir cheema dan Dennis A. Rondinelli, terdiri atas 4 (empat) factor yaitu:

- a. Kondisi Lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya Organisasi untuk

- implementasi program
- d. Karakteristik atau Kemampuan agen pelaksana
2. Teori Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, terdiri atas 3 (tiga) factor atau variable mengukur berhasil, tidaknya suatu implementasi kebijakan public yaitu :
- d.
- a. Karakteristik Masalah (*tractability of implementation*)
 - b. Karakteristik Kebijakan (*ability of statute of implementation*)
 - c. Variable Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)
1. Teori Menurut Merilee S. Grindle (1990)
- Menurut Subarsono.(2010:93) Konsep Teori Merilee S. Grindle terdiri atas 2 (dua) factor atau Variabel yang menentukan berhasil tidaknya suatu Implementasi Kebijakan Publik yaitu:
- a. Isi Kebijakan (*Content policy*), yang sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups, Sejahtera mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak Suatu program sudah ditetapkan.
 - b. Lingkungan Kebijakan yang mencakup beberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi, yang dimiliki oleh para actor yang terlibat, karakteristik institusi atau rezim, yang berkuasa tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
2. Teori Menurut Daniel L. Welmer dan Aidan R. Vining (1999)
- Menurut Subarsono, (2010:103), menjelaskan teori Daniel L. Welmer dan Aidan R. Vining di keluarkan

pada tahun 1999 yang terdiri 3 (tiga) factor Atau variable yang menentukan berhasil tidaknya suatu Implementasi kebijakan public :

- a. Logika dari suatu Kebijakan
- b. Lingkungan Tempat kebijakan
- c. Kemampuan Implementor.

d. Pengertian Implementasi

Menurut Harsono di dalam Londah,Tampi,dan Londa (2018) Menyatakan Implementasi sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan kedalam administrasi. Pandangan Implementasi menurut Grindle dalam buku implementasi kebijakan public Oleh kasmad (2013) yakni secara umum tugas Implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan Tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “apolicy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan di jalan kan dengan harapan sampai pada Tujuan-tujuan yang diinginkan. Ripley dan franklin dalam (kasmad 2013) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi Setelah Undang-undang di tetapkan yang memberikan Otoritas Program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi di pandang Secara luas menurut kadm (2013) Mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai actor, Organisasi, prosedur, dan Teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih Tujuan –tujuan Kebijakan atau Program-

program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang Kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses.

e. Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Publik Memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang melaksanakan kebijakan tersebut implementasi kebijakan akan mem-pengaruhi terhadap unsur-unsur yang yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyerasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigu dan konflik dari implementasi kebijakan dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat- pradigma

Implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

A. 1. Konflik rendah ambiguitas rendah (Implementasi Administratif).

2. Konflik tinggi ambiguitas rendah (Implementasi Politis)

3. Konflik tinggi ambiguitas tinggi (Implementasi simbolik)

4. Konflik rendah ambiguitas tinggi (Implementasi eksperimental).

B. Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut cheema dan Rondineli, ada tiga model yakni: 1) kondisi lingkungan,2) hubungan antar organisasi,3) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (Mutiarin dan Zaenudin, 2014: 34-36). Pertama, kondisi

lingkungan. Implementasi otonomi khusus bagi Papua dalam membuat dan menjalankannya, sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masyarakat yang ada, sehingga ada transparansi atau keter-bukaan dalam membuat program dan menjalankannya secara terbuka dan jujur, supaya implementasi kebijakan otonomi khusus berjalan dengan baik.

1. Model George C. Edwards III (Tahir, 2014 : 61 -62) Di dalam pendekatan studi Implementasi kebijakan pertanyaan di mulai dari bagaimana para kondisi untuk suksesnya kebijakan public. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan public, yakni :

2. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Harn

Model implementasi kebijakan publik menurut, Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono, (2005:99) terkait dengan pemberian abstraksi yang pada dasarnya menunjukkan pada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 1). Standar dan sasaran kebijakan. 2). Sumber Daya. 3). Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas. 4). Karakteristik agen pelaksana dan 5). Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Model implementasi kebijakan, yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn diatas menunjukkan pada suatu model yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Secara sistem variabel-variabel yang saling terkait seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber

daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi maupun politik merupakan kekuatan pemerintah disatu sisi.

3. Implementasi Kebijakan Publik Edwards III (Tahir, 2014: 61)

Model Donald Van Meter Dan Carel Van Horn Van Meter Dan Van Horn Tahir,2014: 71-72) Merumuskan Sebuah Abstraksi Yang Menunjukkan Hubungan

Antar Berbagai Variable Yang Mempengaruhi, Kinerja Suatu kebijakan. Ada Enam Variable Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi, Yakni 1) Standar Dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, 6) Sikap Pelaksana.

Dalam model implementasi kebijakan publik sebagaimana disampaikan Edward III diatas penekanan masing-masing variabel terjelaskan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan
- 2).Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang berpengaruh yaitu pembuatan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang

menjadi aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

- 2) Sumber daya berhubungan dengan isi kebijakan yang harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi ketika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung implementasi kebijakan publik.
- 3) Disposisi merupakan watak serta karakteristik yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokrasi.

f. **Konsep Otonomi Khusus Papua**

Otonomi Khusus Bagi Propinsi Irian Jaya Sebagaimana diamanatkan Kan Dalam Gbhn 1999 Bab Iv Huruf (G) Point 2. Respon Jakarta ini kurang disambut Oleh Rakyat Papua. Disamping itu, Mpr Sendiri dalam Sidang Tahunannya bulan Agustus 2000 Mengeluarkan tap, Yaitu Tap No. Iv Tahun 200, yang Merekomendasikan Kepada Pemerintah dan DPR Agar Menyelesaikan Pembuatan UU Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dengan Memperhatikan aspirasi Masyarakat daerah. Akhirnya Setelah melewati Pembahasan yang Cukup Sengit dan berlarut - Larut Di DPR, Tanggal 20 Oktober Ruu ini disetujui Oleh DPR, dan Tanggal 21 November 2001 Di Tandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri Serta dimuat dalam Lembaran Negara Ri Tahun 2001 Nomor 135. Menurut Krisnus Kum Menyatakan Bahwa Konsep Otonomi Khusus Bagi Masyarakat Asli Papua Pada

Umumnya Mempunyai Pandangan dan Sikap yang Berbeda-Bedah Untuk Menerima dan menghadapi kebijakan Pemerintah yang di Jalankan Era Otonomi Khusus Bagi Papua.

Otonomi khusus di papua dan aceh. Tulisan pertama dipaparkan oleh riris katharina dengan judul “implementasi otonomi khusus di provinsi papua: tinjauan terhadap peran dprp dan mrp”. Ia berpendapat bahwa kinerja para anggota DPRD dalam bidang legislasi rendah yang berakibat pada terlambatnya pencapaian tujuan uu otsus papua. Peran MRP dalam bidang legislasi hampir tidak ditemukan. MRP hanya hadir pada saat pengesahan sebuah rancangan perdusus atau rancangan perdasi menjadi perdusus dan perdasi. Ini terjadi karena kapasitas sdm anggota DPRD dan MRP. Faktor perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan DPRD terhadap otsus papua dan pengawasan yang minim dari pemerintah pusat juga menjadi kendala. dalam kerangka implementasi otonomi khusus.

g. Konsep Pelayanan Pendidikan

Pelayanan adalah Suatu kegiatan Atau Tindakan yang dilakukan Oleh Penyelenggara pelayanan Baik berupa barang ataupun Jasa yang menghasilkan manfaat dari Pemerintah pelayanan. Kampus besar Bahasa Indonesia Menjelaskan Bahwa pelayanan Adalah usaha melayani kebutuhan yang orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang Di tawar kan kepada konsumen atau Pelanggan Yang di layani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Sejalan dengan hal yang tersebut, sebagai berikut:

1. Khusus Standar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar, Kemdiknas Terbitkan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Atau SPM Pendidikan Dasar. Kemdiknas Telah Menerbitkan Regulasi Baru Yakni SPM Pendidikan Dasar. Oleh Karena Itu Direktorat Mendiknasmen Mengadakan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Jakarta. Spm Pendidikan Dasar Ini Bertujuan Untuk Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Pendidikan SD/MI dan SMP/MTS.

2. SPM Diharapkan Mampu Mempersempit Kesenjangan Mutuh Pendidikan Yang Kedepanya Juga di harapkan berimplikasi Pada Mengecilnya Kesenjangan Sosial Ekonomi. SPM mulai di berlakukan dari tahun 2011dengan Tahapan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidikan, Maka diharapkan dalam Waktu tiga Tahun atau Pada Tahun 2013 Seluruh Sd/Mi dan SMP/MT Sudah Melaksanakan Spm. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Selanjutnya di Sebut SPM Pendidikan dasar adalah Tolok Ukur Kinerja Pelayanan Pendidikan dasar Melalui Jalur Pendidikan Formal yang di Selenggarakan Oleh Pemerinta Kabupaten /Kota.

h. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Di Bidang Pendidikan

Penerapan otonomi khusus di provinsi papua penuh dengan dinamika sehingga banyak menguras energy pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan dengan penerapan otonomi khusus bagi rakyat papua semua masyarakat telah menaruh harapan kepada

pemerintah pusat agar dengan demikian rakyat diwilayah tersebut boleh merasakan manfaat dari proses pembentukan otonomi khusus. Salah satu aturan yang mengatur tentang otonomi khusus adalah undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang pembentukan otonomi khusus bagi propinsi papua dimana dalam perjalanan sejarahnya telah dituangkan dalam lembaran negara tahun 2001 No. 135 dan tambahan lembaran negara No. 4151 yang telah diubah dengan perpua No. 1 tahun 2008 (tahun 2008 no. 57 dan No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal telah mengatur berbagai kewenangan yang ada di provinsi papua khususnya dalam menjalankan otonomi khusus. Latar belakang pembentukan provinsi papua telah dituangkan dalam undang – undang nomor 12 tahun 1969, tentang pembentukan provinsi otonomi irian barat dan kabupaten - kabupaten otonom di propinsi irian barat. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1973 diubah namanya menjadi provinsi irian jaya yang kemudian terakhir berdasarkan undang–undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus diubah menjadi propinsi papua.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Meleong, (1996) mendefinisikan bahwa Penelitian Kuantitatif adalah suatu Penelitian Ilmiah, yang bertujuan untuk Memahami Suatu Feneomena dalam konteks Sosial Secara Alamiah dengan mengedepankan Proses integrasi dan Komunikasi yang mendalam

Antara Peneliti dengan fenomena yang Diteliti.

Objek Penelitian

Sugiyono (2019: 144) mengatakan bahwa objek penelitian adalah Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif,valid,dan realiable tentang suatu hal.Umar (2014:303) juga mengatakan bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjkadi objek penelitian.Juga dimana dan kapan penelitian ini akan dilaksanakan Kabupaten Puncak papua Distrik Wangbe ,pada bulan April 2021 sampai dengan selesai. Untuk mem-peroleh data yang di perlukan dalam penulisan Skripsi, maka penulis mengadakan Penelitian di kabupaten Puncak papua Distrik Wangbe.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud-kan untuk membatasi studi Kualitatif Sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2015). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.Penelitian ini akan di fokuskan pada Implementasi Kebijakan Otonomi khusus dalam pelayanan bidang pendi-dikan Gratis bagi siswa Sekolah dasar di Distrik Wangbe dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendi-dikan bagi kabupaten puncak papua yang di dasarkan pada model Implementasi kebijakan dari Chares O. Jones dalam pih dan Londa (2016:77.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pejabat /atau ASN yang bertugas di kabupaten atau distrik. Untuk memperoleh data yang memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dan dapat di pertanggung jawabkan, maka penentuan subyek penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive* Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2019: 218).

Informan Penelitian adalah Orang yang di dimanfaatkan Untuk memberikan Informasi tentang situasi dan Kondisi latar belakang Penelitian ini:

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang Paling strategis dalam Penelitian, karena tujuan utama dari Penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyano, 2012 : 224). Dalam Penelitian ini, Penelitian Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Meliputi :

1. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright dalam herdiansyah (2010) Mendefinisikan Observasi Sebagai Suatu Proses Melihat, Mengamati dan Mencermati Serta Merekam Perilaku Secara Sis-tematis Untuk Suatu Tujuan tertentu. Observasi dalam Penelitian ini diantaranya mencakup Keadaan Geografis dan Kehidupan sosial dan Politik di Masyarakat di Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Papua.

2. Wawancara

Meleong (2007:186) Menjelaskan bahwa wawancara adalah Percakapan dengan Maksud tertentu

yang dilakukan Oleh dua Pihak, yaitu Perwawancara (Inter-viewer) yang Mengajukan Per-tanyaan, dan terwawancara (Inter-viewee) yang Memberikan Jawaban atas Pertanyaan itu. Wawancara Secara umum terbagai menjadi dua, yaitu : Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur Memiliki Arti Bahwa Wawancara yang dilakukan dimana Pewawancara Telah Menetapkan sendiri-sendiri masalah-Masalah yang akan diajukan Sebagai Pertanyaan. Sedangkan Wawancara tidak Terstruktur Merupakan Wawancara yang Memiliki Ciri Kurang diinterupsi dan arbiter. Wawancara tersebut digunakan untuk Mene-mukan informasi bulan baku atau informasi tunggal (Meleong, 2007 : 190). dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Wawancara Secara Semi terstruktur Maupun tidak terstruktur. Namun, Pada Pelak-sanaan nyananti akan disesuaikan dengan Keadaan Responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-arang tertulis (arikunto, 2002:135). Dokumentasi dilakukan dengan Cara Mengumpul Kan dokumentasi Pendukung data- data Penelitian yang dibutuhkan.Dalam Penelitian ini.

Teknik Penelitian Keabsahan Data

Peneliti Akan melakukan Keabsahan data. Data yang salahakan menghasilkan Penarikan Kesimpulan yang salah,

demikian Pula sebaliknya, data yang Sah akan Menghasilkan Kesimpulan hasil Penelitian yang benar. Alwasilah dalam bachri (2010: 54) Menjelaskan bahwa tantangan bagi segala Jenis Penelitian Pada Akhirnya adalah terwujudnya Produksi Ilmu Penge-tahuan yang valid, salah, benar dan beretika. Kebenaran Atau validitas harus dirasakan Merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal Menurut alwasilah (Dalam bachri, 2010: 54) yakni: 1) Deskripsi 2) Interpretasi, dan 3) Teori dalam Penelitian Kuantitatif. Untuk Menetapkan Keabsahan data diperlukan teknik Pemeriksaan. Pelaksanaan teknik Pemeriksaan data di dasarkan atas Sejumlah Kriteria tertentu.

Menurut bachri (2010: 55) Ada 4 (Empat), Yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya Menggantikan Konsep validitas internal dari Non kuantitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat Kepercayaan Penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat Kepercayaan Hasil-hasil Penemuan dengan Jalan Pembuktian Oleh Peneliti Pada Kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (Transferability)

3. Kebergantungan (Dependability)

Merupakan Substitusi Istilah Realibilitas dalam Penelitian Non kuantitatif, yaitu bila di tiadakan dua atau beberapa kali Pengulangan dalam Kondisi yang Sama dan hasilnya Secara esensial Nama. Sedangkan dalam Penelitian Kuantitatif sangat Sulit mencapai kondisi yang Benar -benar Sama. Selain itu karena Faktor manusia sebagai instrument, Faktor Kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian (Confirmability)

Pada Penelitian Kuantitatif kiriteria katau Objektivitas hendaknya harus Menekankan Pada datanya bukan Pada orang atau banyak orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kuantitatif yang lazim digunakan oleh setiap peneliti kuantitatif, oleh karena itu penulis mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para alih peneliti kuantitatif, yakni ber-patokan pada konsep yang dibangun oleh miles dan huberman (1992 dalam meleong, 2004). Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan inter-active model analisis dari miles dan huberman (1992).

Kegiatan analisis dibagi Menjadi 3 Tahap, yaitu Pengumpulan data, Reduksidata, Penyajian data dan verifikasi data.

• **Tahap Reduksi Data**

Reduksi data yaitu Proses Pemilihan data kasar dan Masih mentah berlangsung terus menerus Selama Penelitian berlangsung melalui tahapan Pembuatan Ringkasan, memberi kode, Menesuri tema, dan menyusun Ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan Penulis adalah menelaah secara Keseluruhan data yang dihimpun dari Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

• **Tahap Penyajian Data**

Seperangkat hasil Reduksi data Kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks yang diberi Nama display data Sehingga terlihat gam-barannya Secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan Cara Penyampaian Informasi berdasarkanin

formasi yang dimiliki dan disusun Secara runut dan baik .

- Tahap Verifikasi Data.
verifikasi data Penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai Sumber, Kemudian Penulis mengambil Simpulan yang telah diambil dengan data Pembandingan teori Tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Distrik Wangbe

Distrik Wangbe Adalah Sebuah Kabupaten Puncak Papua, Dibentuk Pada Tanggal 4 Januari 2009 Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-Sama dengan Pembentukan 3 distrik lainnya di kabupaten puncak. Peresmian dilakukan oleh bapak Wilem Wandik, S.E, M.Si Bapak adalah Sebagai Kepala daerah kabupaten puncak Papua. Puncak Pada tanggal 21 Juni 2009 distrik wangbe adalah hasil Pemekaran dari distrik induk beoga. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2008, Distrik Wangbe beribukota di Ailpalin, terbagi dalam 14 desa terdiri dari 24 Kampung:

Rata-Rata Jumlah kampung distrik wangbe Jumlah kampung berdasarkan Hasil Spt 2010 Desa mirilaukin adalah Salah Satu kelurahan bagian dari distrik wangbe kabupaten kuncak kota Ilaga. Dengan luas wilayah 422,7 ha, yang terdiri dari luas Sawah atau gunung rawan 216,681 ha, Lembah-lembah gunung 206,019 ha. secara geografis adapun batas-batas desa/Kampung mirilaukin 1 Saat Ini Sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Beoga tengah.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa Wangbe Timur .

3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ailpalin Utara.

4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Nagalagama dekat gunung dempo.

Letak Geografis

Kabupaten puncak mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara desa Beoga, Sebelah selatan Wangbe, Sebelah utara Ogamanin , Sebelah timur ailpalin puncak, Sebelah Wangbe barat dan Kabupaten Distrik Beoga Selatan: Gunung Barat: Distrik Emawugi . Letak geografis Distrik Wangbe Kabupaten puncak papua terletak antara 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Profinsi Papua. dan Wangbe adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Barat, Jauh, dari Mimika Timur Tengah, Agimuga dan Kelmaber sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga Desa-desa /kampung ini tidak memiliki pantai. Wilayah Distrik wangbe Kabupaten Puncak memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah.

Kependudukan

Penduduk Distrik Wangbe, pada data tahun 2010 berjumlah 1.404 kepala keluarga, 2241 jiwa terdiri dari laki -laki 1.123 jiwa, perempuan 2.219 jiwa.

Agama

Selain itu adapun kepercayaan etnis-etnis di Distrik wangbe kabupaten puncak adalah sebagian besar Kristen dan agama lain adalah Katolik dan Islam .

Susunan Organisasi dan Fungsi

1. Susunan Organisasi
2. Tugas dan fungsi bidang Komunikasi dan Informatika di Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Yaitu:

- 1) Tugas Pokok dinas komunikasi dan Informatika di Distrik wangbe dan Informatika kota Ilaga yaitu Membantu kepala daerah dalam Menyelenggarakan Sebagian Urusan, Pemerintahan Di Bidang komunikasi, Infor-matika, Persandian dan Statistic.

- 2) Fungsi dinas Komunikasi dan Informatika di Kota ilaga kabu-paten puncak yaitu:

- Pelaksana urusan pemerintahan di bidan pendidikan dan infor-matika setiap persandian dan statistik;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi;
- Pelaksanaan penelitian dan kebijakan terapan serta pelayanan bidang pendidikan dan penelitian tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan komunikasi teradap pelayanan pendidikan dan statistik dan persandian dan otonomi daerah;
- Pelaksanaan pengawasan melekas dan pengawasan fungsional;

Dalam Peraturan tersebut di jabatkan tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kepala Distrik daerah Wangbe kabupaten puncak dalam Rangka mewujudkan pelayanan teradap Setiap masyarakat & lebih utama Pelayanan kepada Anak-anak sekolah, dalam hal

kesejahteraan dan Melin-dunggi masyarakat secara Profesional, Akuntable, transpransi dan partisipatif.

Penelitian ini terdapat bahwa Perjabatan Priode ke Priode Setiap Kebijakan Oleh Pemerintah Distrik Wangbe kabupaten Puncak papua, ada jalankan Program Setiap karietnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Hasil Penelitian Wawancara

Hasil Wawancara ini Dilakukan Langsung Oleh Informan Yaitu Orang yang terlibat Pada Implementasi Kebijakan ini.Termasuk juga Peme-rintah dan Masyarakat. Wawancara ini Dilakukan dengan Memberikan Pertanyaan Sesuai Dengan Judul: "Implementasi kebijakan otonomi Khusus pelayanan Bidang Pendidikan Distrik Wangbe kabupaten Puncak". Dari beberapa hal mewawancari yang sudah dibahas di bab sebelumnya dapat ditentukan bahwa otonomi khusus butuh sentuhan pendekatan baru yang lebih efektif, produktif dan komprehensif untuk mengawal pelaksanaannya Implementasi Kebijakan di sisa tahun ini. Berdasarkan hasil Wawancara Men-dalam yang dilakukan dalam Rangka Pengumpulan data lapangan maka hasil wawancara dapat di sajikan Sesuai dengan Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori dari Erdward III Dalam (

Dwiyanto,2009 : 31) yang mengatakan

Bahwa untuk mengukur Keberhasilan Suatu implementasi kebijakan Dapat di lihat dari 4 dimensi yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, Struktur, Birokrasi. keempat dimensi tersebut akan dideskripsikan

berdasarkan Hasil Penelitian di bahwa ini. Deskripsikan Hasil Wawancara Penelitian menurut Informan:

1. Kepala Dinas Komunikasi di Distrik wangbe kabupaten /kota puncak
 - (a) “Struktur organisasi di Kantor dinas Komunikasi di kabupaten puncak telah melaksanakan Suatu Kegiatan usaha manusia untuk Menyampaikan yang Menjadi Pikiran dan Pera-saannya Kepada Orang lain. Faktor Komunikasi dianggap Sebagai faktor yang Sangat Penting Karena dalam Setiap Proses kegiatan yang melibatkan Setiap unsur Manusia dan Sumber daya Akan Selalu berusaha dengan Permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukannya”. Menurut Kepala dinas Komunikasi Kabupaten puncak distrik Wangbe, Pencapaian Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Publik Mensyaratkan Pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan Secara Jelas.
 - (b) Untuk Itu, Penting Adanya konsistensi komunikasi dari atas Ke bawah yang tegas dan Jelas Sehingga tidak ada kelonggaran bagi Pelaksana untuk menafsirkannya berbeda, Perlunya Ketepatan dan keakuratan Informasi.
2. Menurut kepala desa Wangbe Emon kiwak berpendapat bahwa, Saya melihat dengan mata, Struktur birokrasi Pemerintahan distrik wangbe kabupaten puncak, ini sangat kurang Efektif, dan konsisten, kebijakan, komunikasi, informasi

Terhadap Masyarakat serta kepala desa Kurang, mengenai mekanisme dan aturan pelaksanaan kebijakan disampaikan oleh Kepala dinas komunikasi kabupaten puncak distrik wangbe.

3. Sumber Daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau, aturan serta akuratnya komunikasi, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakann kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.
4. Kepala Seksi Infrastruktur II Alpon Newegalnen S.Pak berpendapat Bahwa pandangan saya melihat kepada, kepala Distrik Wangbe begitu ada Struktur Brokrasi, Pemerintahan Namun kadang kalah tidak ada realitasnya ,sesuai dengan program tersebut.
 1. Disposisi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Edyanto) Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana harus mengetahui apa yang mesti dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik.

Menurut Edward III dalam, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah proses dari pemerintah.

Rangkuman Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan tentang implementasi kebijakan Dengan Tujuan yaitu mempermudah masyarakat distrik Wangbe kabupaten puncak dalam hal melihat keadaan di Distrik wangbe ini, adalah pelayanan public dengan memanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa dapat keadaan yang kondusif Di distrik ini, karena sudah banyak di ketahui masyarakat, lewat media social pemerintah dan juga orang-orang sekitar yang sangat disayangkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui, Fungsi implementasi dan kebijakan ini karena tidak mengetahui, langsung dari pemerintah distrik wangbe. Dilihat dari hasil penelitian kendala yang sering di

temukan adalah keadaan masi di beberapa bagian tempat di distrik wangbe dan juga sering terjadi kurangnya pemerintah belum mak-simalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai Implementasi kebijakan di Distrik wangbe yang dilakukan Melalui Wawancara, Observasi dan Studi Lapangan Menunjukkan Bahwa Kebijakan Pelayanan dalam hal otonomi khusus bidang pendidikan pada Umumnya Sudah berjalan dengan baik Namun beberapa Aspek yang belum maksimalkan. Pelayanan bidang pendidikan dan Dinas Komunikasi dan informatika, di Distrik Wangbe kabupaten puncak sebagaimana maka peneliti akan Membahasnya dengan Menggunakan Pendekatan Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Organisasi/ Birokrasi, Implementasi komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public Sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sehubungan Dengan Komunikasi, dan Informati yang di lakukan Oleh Kepala Dinas Komunikasi, dan Informati Kepada setiap Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan Informati yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. . Menurut pen-capaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik

mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Implementasi menurut Edward III dalam , komunikasi mempunyai peranan penting, tidak hanya bagi para implementor tetapi juga bagi policy maker. Untuk itu, penting adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah yang tegas dan jelas sehingga tidak ada kelonggaran bagi pelaksana untuk menafsirkannya berbeda, perlunya ketepatan dan keakuratan informasikan kepada masyarakat, Lebih khususnya Distrik Wangbe Kabupaten Puncak.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Pengamatan yang dilakukan peneliti dimana peneliti melihat bahwa semua pelaksana sudah memahami tentang kebijakan, informasi mengenai mekanisme dan aturan pelaksanaan kebijakan disampaikan pada orang yang tepat.

2. Sumber daya

Diketahui bahwa sumberdaya manusia, Sebagai Pelaksana Program Struktural Birokrasi Pemerintahan, Distrik wangbe juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau, aturan serta akuratnya komunikasi, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakann kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

3. Disposisi

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, bahwa kualitas Pelayanan bidang pendidikan yang di selenggarakan oleh Pemerintahan. Distrik Wangbe kabupaten puncak, masih perlu disingkatkan. Hal-hal yang di perlu di benahi terkait dengan implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua (Edyanto) disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, dalam pelayanan yang di perlu memberikan pelayanan yang, perlu untuk ditingkatkan, kepuasan kepada masyarakat

Struktur Organisasi / Birokrasi

MMax weber (1948) Menjelaskan bahwasanya Organisasi tersebut, Memiliki tanggungjawab Serta kewenangan dan pembagian kerja bertujuan dalam mengeksekusi Fungsi tertentu, ini meliputi kewajiban untuk merancang satuan-satuan Organisasi dan merinci intraksi yang harus ada diantaranya satuan-satuan dan Orang-orang. Suatu- struktur yang jelas dalam organisasi sangat di perlukan dalam mengimplementasian, pada suatu Infrastruktur, membutuhkan keterlibatan menyeluruh dari pihak dinas Komu-nikasi, dan pemerintahan Distrik wangbe, serta pejabat yang harus melaksanakan pekerjaan Memutuskan Fungsi-fungsi Mereka tersebut Suatu kebijakan cukup dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mereka pun mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi masih belum efektif karena ketidak efektifan struktur birokrasi. Menurut

kewe-nangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasi-lan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber - sumber untuk melak sanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melak-sanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus dalam peyanan bidang pendidikan di kabupaten puncak Distrik Wangbe, telah dilakukan Sebagaimana aspek Komunikasi dapat di tarik menjadi kesimpulan bahwa pemberlakuan otonomi khusus kebijakan papua yang ditetapkan dengan uu nomor 21 tahun 2001, telah memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk perumusan dan program pemerintahan distrik wangbe, yang berpihak kepada masyarakat , namun dalam implementasi masih terdapat masalah dan masih belum mencapi tujuan daripada otsus karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan keberhasilan, kesejahteraan, dalam bidang pendidikan dan segala bidang kesehatan dll. dilihat dari (4) dimensi sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima.
2. Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau aturan serta akuratnya komunikasi.
3. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, dalam pelayanan yang di perlu memberikan pelayanan yang, perlu untuk ditingkatkan, kepuasan kepada masyarakat
4. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Menurut Edward III dalam, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Struktur birokrasi.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada maka untuk dapat Menjadikan Implementasi kebijakan otonomi khusus dalam pelayanan Bidang pendidikan, sekolah dasar di Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak baik disarankan Sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Komunikasi Kabu-paten puncak Distrik wangbe, Sarankan

kepada bidang –bidang , yang terkait tepat. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan, untuk mendapatkan tanggapan dari penerima Komunikasi .

2. Sumberdaya manusia yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini, dilakukan semuanya sebagai-mana di maksudkan; dan berbagai fasilitas, di prioritaskan mereka yang berlatar belakang pendidikan, Komunikasi itulah dimanfaatkan sebagai tenaga Sumberdayah manusia.
3. Kepala pemerintahan Distrik Wangbe Di sarankan bahwa, Sumber daya Pelaksana kebijakan otonomi khusus Papua boleh dikatakan cukup berpendidikan, dan berpengalaman.
4. Bapak kepala desa Mirilaukin, edi Sarankan bahwa saya melihat kepada, bapak kepala distrik Wangbe begitu ada Struktur Brokrasi, Pemerintahan Namun kadang kalah tidak ada realitasnya, sesuai dengan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Sardiman. 2009. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. RajawaliPers.
- Abdul, S.2016. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke -penyusunan Model Implementasi Kebijakan public* ,Cetakan Ke-empat. PT Bumi Aksara.
- Amin, I. 2008. *Teori dan konsep; pelayanan publik serta implementasinya*. Bandung ,Bandar Maju.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta :PT. Bumi Aksara.
- Erdward III, Dalam (Dwiyanto,2009 : 31) *Implementasi kebijakan pemerintahan*
- Matland, Hamdi, 2014: 98.literatur mengenai implementasi kebijak otonomi khusus.
- UU, No.32 tahun 2004 Pasal 1 No.5, memberikan definisi otonomi daerah
- Nogroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi ,dan Evaluasi*.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Wasihington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marilee S., 1980. *Implementation as A Pilitical and Administrative Process* Princetone University Press.
- Dan Informatika Kota manado), *Jurnal Ilmu pemerintahan* 3.(3) *Journal.unsrat.ac.id*.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavivour*. New Jersey, US : Prentice Hal.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (plus duabelas Langkah Strategis)*. CV.Media Brilian. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ii, ” *Kebijak. Dan Manaj. Publik*, Vol. 2, No. 1, P. 10,2014.
- W. A. A. Depinus Tabuni, Patar Rumapea, “*Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) Di Kabupaten Lanny Jaya*,” *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 43, pp. 3–12, 2016.
- D. R. Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, 1st ed. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- (Tahir, 2014: 61). *Model. Donald Van Meter. Dan Carel Van Horn Van Meter Dan Van Horn Tahir*,2014 *Bahan Bidang Studi George C. Edward III*.
- (Kasmad.2013), *Implementasi Kebijakan Di Pengaruhi Oleh. Komunikasi*.

- Rumapea, William Agustinus Areros (2016) *Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado*. Jl . Kampus Unsrat Bahu, Malalayang Manado 95115:
Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved From <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fatah, Abdul, 2012, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Daerah Perbatasan Kabupaten Bandung Barat, Disertasi*
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar* . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved From <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Soedjadi, 2001, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen, Jakarta.*
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & .
- Saydam, Gozali. 2000. *Perencanaan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta ; Penerbit Gunung Agung jakarta.*
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, Edisi ke 15, Bandung.*
- Pradana, G. A. (2016). *Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86. Retrieved from Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta :PT. Bumi Aksara.*
- Sumber-sumber Lain:
- Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang *Pembentukan Otonomi Khusus Bagi*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, *Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi*
- Irian Jaya ,Yang kemudian terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas*